

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dan berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Landasan Teori**

###### **2.1.1.1 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Dimana jika masyarakat merasa tidak puas dengan operasi organisasi secara sah (legitimate) maka masyarakat dapat mencabut kontrak sosial dalam operasi organisasi (Deegan, *The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures – A Theoretical Foundation*, 2002). Dowling dan Pfeffer (dikutip dari Ghazali dan Chariri, 2007) menyatakan teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Mereka mengatakan : Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana

perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan dan dicari perusahaan dari masyarakat (Hariri & Ghozali, 2007) Shocker dan Sethi (1974) dikutip dalam (Hariri & Ghozali, 2007) memberikan penjelasan mengenai kontak sosial sebagai berikut :

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan hidup pertumbuhan didasarkan pada :

1. Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas
2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak publik (Deegan & Rankin, 1996). Demikian halnya dengan pemerintahan daerah. Dewasa ini, seiring adanya jaminan akan demokrasi pasca reformasi, masyarakat menjadi semakin kritis dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. (Widjajanto, Purwanto, & Rijati, 2015) menyebutkan keterbukaan informasi merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatian masyarakat. Semangat reformasi di bidang keuangan dan reformasi berbagai aspek di berbagai lingkungan telah mendorong kepercayaan diri masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja pemerintah khususnya dalam

pola pengelolaan keuangan. Bentuk perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan. Dampaknya, suatu pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel sudah menjadi harapan masyarakat secara umum. Seiring harapan masyarakat yang berubah, pemerintah daerah juga harus dapat beradaptasi dan berubah. Pemerintah daerah dikatakan efektif apabila dapat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan yang menjadi perhatian (Deegan, Rankin, & Voght, 2000).

Pemerintah daerah dapat memenuhi harapan masyarakat dengan melakukan pelaporan keuangan sukarela di internet. Pelaporan keuangan di internet secara sukarela merupakan suatu bentuk mengkomunikasikan informasi keuangan yang mengandung nilai akuntabilitas serta merupakan wujud transparansi atas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Cara ini dianggap tepat mengingat menurut Dowling dan Preffer dalam (Deegan, Rankin, & Voght, 2000) strategi yang dapat dilakukan untuk melegitimasi aktivitas suatu organisasi ialah dengan strategi komunikasi. Ditambahkan lagi oleh Hurst (1970) dalam Deegan (2000) bahwa laporan akuntansi dapat menjadi alat melegitimasi keberadaan suatu organisasi.

Menurut Deegan (2000), organisasi harus beradaptasi dengan harapan masyarakat jika ingin sukses. Dengan memenuhi harapan masyarakat, aktivitas dan kinerja pemerintah daerah dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena telah diketahui bahwa pemenuhan harapan masyarakat berdampak baik terhadap organisasi, pemerintah daerah akan cenderung untuk melakukan pelaporan

keuangan di internet secara sukarela dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

### **2.1.1.2 Teori Stakeholder**

*Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Hariri & Ghozali, 2007). Gray, Kouhi, dan Adams (1994) dalam (Hariri & Ghozali, 2007) mengatakan bahwa Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan itu harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Setiap *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai pengaruh *stakeholder* terhadap organisasi, sekalipun *stakeholder* memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut ataupun *stakeholder* tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap keberlangsungan organisasi (Deegan, Rankin, & Voght, 2000). Sehubungan dengan "hak atas informasi" itu, Gray, Owen, dan Adams (1996) dalam Deegan (2000) membuat *accountability model*, yang menganggap pelaporan (*reporting*) lebih sebagai wujud pertanggungjawaban dibanding wujud pemenuhan tuntutan. Dengan kata lain, tiap pihak dalam lingkungan organisasi memiliki hak untuk diinformasikan mengenai operasi organisasi. Hal yang sama juga berlaku pada pemerintahan daerah. Pelaporan keuangan di internet secara sukarela dapat

memberikan informasi yang bermanfaat bagi *stakeholder*. Pemerintah daerah dapat melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela sebagai upaya mendapatkan dukungan dari *stakeholder*. Apabila *stakeholder* mendukung pemerintahan daerah, maka aktivitas pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik.

### **2.1.1.3 Teori Agency**

Teori Agency (Hendriksen & Breda, 2000) menjelaskan bahwa teori agensi (*agency theory*) adalah hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam hal ini selaku *agent* adalah pemerintah daerah, sedangkan *principal* adalah masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Masyarakat selaku *agent* dalam hal ini memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terkadang informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ketidaksamaan informasi ini menimbulkan asimetri informasi yang mendorong perilaku oportunistik dan konflik kepentingan. Para pejabat pemerintah daerah akan berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan masyarakat. Adanya masalah berupa konflik kepentingan dan asimetri informasi ini dapat mengakibatkan sebuah pemerintahan menanggung biaya keagenan yang cukup besar, dalam rangka mengawasi dan memastikan tidak ada hal-hal yang dapat merugikan masyarakat selaku *principal*. Oleh karena itu, untuk menekan biaya keagenan dan meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah, diperlukan adanya transparansi informasi dari pemerintah daerah yang simetris dengan keadaan sebenarnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan

pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mengungkapkan informasi akuntansinya melalui *internet*. Menurut (Bertot, 2010) dengan kemudahan mendapatkan informasi tentang pemerintah, seperti halnya pelaporan keuangan melalui *internet*, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi korupsi.

#### **2.1.1.4 Pemerintahan Daerah di Indonesia**

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah provinsi terbagi atas daerah kota dan daerah kabupaten. Setiap daerah provinsi, daerah kota, dan daerah kabupaten mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14, kepala daerah berperan

sebagai badan eksekutif, yang artinya kepala daerah menyusun dan menyampaikan anggaran untuk mendapatkan persetujuan, kemudian melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung kepala daerah (pilkada). Pilkada dilaksanakan secara langsung, terbuka kemungkinan bagi calon independen/nonparpol untuk maju melalui partai politik (parpol)/gabungan parpol, dan proses penyaringan bakal calon dilaksanakan secara terbuka dengan mewajibkan tiap parpol/gabungan parpol mengumumkan proses dan hasil penyaringan kepada masyarakat.

#### **2.1.1.5 Kompetisi Politik**

Menurut (Agnesi, 2016) Kompetisi politik :

“Proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu dalam bidang politik yang menjalani ideologi atau dibentuknya dengan tujuan khusus.”

Sedangkan menurut Menurut (Firmanzah, 2010, hal. 33),

Kompetisi Politik didefinisikan sebagai berikut :

“Kompetisi politik merupakan sebuah konsep yang dapat memenangkan kompetisi pemilu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dimana partai politik perlu memonitor dan mengevaluasi setiap strategi dan aktifitas yang dilakukan partai lain layaknya prinsip *'zero sum'* setiap kemenangan dari satu pemain merupakan kekalahan dari pihak lain.”

Menurut (Deaux, Dane, & Wrightsman, 1993, hal. 157), kompetisi politik ialah :

“Aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur *reward* dalam suatu situasi politik tertentu.”

Menurut (Bardhan, 1984, hal. 29), menjelaskan bahwa kompetisi politik adalah :

“kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan mengendalikan pemerintahan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan politik dan kepentingan masyarakat”

Pendapat (Downs, 1957, hal. 99), mengatakan bahwa kompetisi politik adalah :

“kompetisi antara kandidat untuk mendapatkan suara terbanyak dari pemilih untuk menjalankan suatu platform kebijakan yang layak dijalankan.”

Berdasarkan uraian di atas, menurut (Agnesius, 2016), (Firmanzah, 2010), (Deaux, Dane, & Wrightsman, 1993), (Bardhan, 1984), serta (Downs, 1957) maka dapat disimpulkan bahwa, kompetisi politik adalah suatu persaingan antar kelompok atau individu dari beberapa partai politik yang tujuannya untuk memenangi kontestasi pemilihan baik berupa pemilihan dalam hal legislatif maupun pemilihan dalam hal eksekutif guna menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat politik yang dianut dari masing-masing kelompok.

Salah satu perubahan yang cukup mendasar paska reformasi adalah meningkatnya persaingan politik di Indonesia. Persaingan politik yang tinggi akan



meningkatkan biaya sehingga kepala daerah terpilih sering mengabaikan janji-janji pada saat pemilukada. Pencalonan kepala daerah juga tidak lepas dengan partai politik yang mendukungnya. (Zaman, 2016) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. (Gatara, 2008) menyatakan bahwa setiap definisi tentang partai politik akan berhubungan dengan kekuasaan (jabatan publik atau jabatan politik) sebagai tujuan umum yang dimiliki oleh setiap partai politik ketika melakukan aktivitasnya. Posisi partai politik dalam pilkada sangat strategis. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa semua calon yang berhak maju dalam pertarungan harus dicalonkan partai politik tertentu. Calon kepala daerah yang berhak maju harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai 15 % kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau suara pada pemilihan legislatif.

(Zaman, 2016) menyatakan bahwa sebagai organisasi yang mengartikulasikan kepentingan rakyat, partai politik sering dihubungkan dengan kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Partai politik dibentuk guna mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan publik termasuk kepala daerah. Wujud nyata partai politik dalam menghasilkan kader untuk didelegasikan sebagai pemimpin adalah keikutsertaannya dalam pilkada. Partai politik sendiri ataupun anggota partai yang mencalonkan menjadi calon kepala daerah turut berkompetisi

dalam pilkada. Pilkada hadir sebagai arena bagi partai politik dalam bersaing dengan partai politik lainnya untuk mendapat kekuasaan lokal.

Internet merupakan sarana paling mudah dan murah bagi pemerintah daerah untuk melaporkan informasi sebagai bukti kinerja pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian (Rahman, 2013) dengan adanya bukti kinerja yang baik membuat pejabat daerah terpilih agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya.

Kompetisi politik atau disebut juga dengan persaingan politik dapat dilihat dari persaingan antara partai politik dalam mendapatkan jumlah pemilih pada saat pemilu. Kompetisi politik menggambarkan seberapa besar persaingan politik antara kepala daerah yang menjabat saat ini dengan para saingan politiknya (Diani, 2016). (Rahim & Martani, 2016) menyatakan bahwa kompetisi politik ditunjukkan dengan besarnya persaingan untuk menduduki jabatan kepala daerah. Semakin banyak jumlah saingan dalam pemilihan kepada daerah, maka semakin besar persaingan politik. Persaingan politik yang tinggi menjadi salah satu bentuk pengawasan kepada pemerintah terpilih. Pemerintah daerah yang memiliki kompetisi politik yang tinggi memiliki insentif untuk melaporkan informasi pelaksanaan pemerintah lebih besar karena adanya pengawasan dari lawan politik ini, salah satunya melalui media internet.

#### **2.1.1.6 Ukuran Pemerintahan Daerah**

Ukuran pemerintahan daerah menurut (Damanpour, 1991) adalah :

“besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas.”

Sedangkan menurut (Patrick, 2007), Ukuran pemerintah daerah ialah :

“seberapa besar pemerintahan daerah dengan jumlah aset/pegawai/produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil.”

Berdasarkan uraian diatas, menurut (Damanpour, 1991) dan (Patrick, 2007), dapat diambil kesimpulan bahwa Ukuran Pemerintahan daerah ialah sebuah ukuran untuk menentukan seberapa besar pemerintah daerah tersebut, yang ditinjau dari beberapa tolak ukur. Dalam penelitian ini, total aset atau total aktiva pemerintah daerah dipilih sebagai tolak ukur dalam menentukan ukuran suatu pemerintahan daerah.

Total aset dipilih karena nilainya yang lebih stabil daripada pendapatan, jumlah pegawai ataupun total produksi suatu daerah. (Lesmana, 2010), menggunakan ukuran total aset dalam mengukur ukuran pemerintah. Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut. Berikut ini disajikan tabel perbandingan penelitian terdahulu yang mencantumkan indikator tolak ukur mengenai Ukuran pemerintahan Daerah.

**Tabel 2.1**

**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Jumlah pegawai	Total Pendapatan	Total aset	Tingkat produktifitas
1	Lesmana (2010)			√	
2	Sari, dkk (2017)			√	
3	Alvini (2018)			√	
4	Alwahidi (2019)			√	
5	Syamsul, dkk (2016)			√	

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Lesmana, 2010), (Sari & Mustanda, 2019), (Alvini, 2018), (Alwahidi & Darwanis, 2019), serta (Syahrir & Ritonga, 2016), maka indikator yang dipergunakan dalam penentuan Ukuran pemerintahan daerah adalah total aset

#### **2.1.1.7 Kekayaan Pemerintah Daerah**

Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 sebagai berikut:

“Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.”

Sementara menurut (Sinaga & Prabowo, 2011), menjelaskan bahwa :

“Kekayaan pemerintah daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah.”

Berdasarkan uraian (Sinaga & Prabowo, 2011) serta pengertian dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Kekayaan Pemerintah daerah merupakan sebuah ukuran pendapatan daerah yang dihitung dari hasil pendapatan seluruh sektor pada suatu daerah yang nantinya dapat menggambarkan suatu tingkat kemakmuran daerah tersebut.

Sumber kekayaan daerah yang utama yaitu Pendapatan Asli Daerah. PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan

ketertiban masyarakat. Kecenderungan pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan daerah yang tinggi untuk menyajikan laporan keuangannya di internet sangatlah besar, hal ini didasari pada kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam menggunakan sumber daya manusia yang dibutuhkan beserta dengan perangkat-perangkat lainnya memiliki keseimbangan dalam tujuan maupun cita-cita yang dicapai dari pemerintah daerah tersebut.

#### **2.1.1.8 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Secara umum tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah antara lain :

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
- c. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.

- d. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
- e. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- f. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
- g. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

### **2.1.1.9 Penyajian Laporan Keuangan**

Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat & Ahmad, 2007). (Atrill & McLaney, 1991) menyebutkan kriteria yang harus dimiliki oleh pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu dan biaya/manfaat. Ditegaskan bahwa relevan dan dapat diandalkan dari pelaporan keuangan dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat, namun jika laporan keuangan tidak dapat dibandingkan, tidak dapat dimengerti dan tidak tepat waktu, biaya yang lebih besar dari manfaat maka akan mengurangi manfaatnya.

Pembuatan laporan keuangan di sektor pemerintahan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan wajib melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan berikut ini :

#### 1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### 2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

#### 3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam



pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

#### 4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi mendatang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Informasi akuntansi dapat digunakan dalam mengawasi dan menjalankan kontrak politik, ekonomi dan sosial (Chan, 2003) Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami menurut (Schiavo Campo & Tommasi, 1999).

Agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada saat ini, pemerintah di Indonesia sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP Nomor 24 tahun 2005 menjadi PP Nomor 71 tahun 2010). Di dalamnya terdapat Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang memuat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif itu dapat diartikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah perlu memenuhi empat karakteristik berikut, yakni :

#### 1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka. Selain itu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.

Informasi yang relevan:

##### a) Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi/kejadian mereka di masa lalu.

##### b) Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

##### c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

##### d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala

yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penggunaan informasi yang relevan, tetapi hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

### (a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

### (b) Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### (c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

#### **2.1.1.10 Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD)**

Sesuai Pernyataan Nomor 1 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja

keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, karena mereka telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem *reward and punishment* yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Jadi, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya.

Tujuan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah untuk menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan, dan sebagai media akuntabilitas sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga pemerintah. Dari sisi rakyat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dengan baik dapat menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Selain itu, tujuan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukannya, serta hasil yang berhasil dicapai, dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur, pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- 1) Akuntabilitas, yakni mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 2) Manajemen, yakni membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode

pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

- 3) **Transparansi**, yakni memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- 4) **Keseimbangan Antargenerasi** ("intergenerational equity"), yakni membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

#### **2.1.1.11 Manfaat Pelaporan Keuangan di Internet**

Berdasarkan pendapat dari (Styles & Tennyson, 2007), suatu cara yang mungkin paling nyaman dan *cost effective* bagi pihak pemerintahan untuk menyebarkan informasi di zaman sekarang adalah menggunakan internet. Peraturan menggunakan internet untuk menyebarkan laporan tahunan pemerintahan kepada masyarakat sudah menjadi perhatian dari dunia internasional, khususnya dari *Governance Finance Officers Association* (GFOA) di Amerika Serikat. GFOA meyakini banyak manfaat dari publikasi dengan menggunakan internet, diantaranya :

1. Meningkatkan kepedulian terhadap dokumen. Pemerintahan daerah akan semakin peduli dengan dokumen-dokumen daerah karena sewaktu-waktu dokumen tersebut harus dapat dipublikasikan.
2. Meningkatkan pemakaian oleh *stakeholders*. Laporan keuangan pemerintah dan dokumen anggaran menyediakan sumber informasi yang penting bagi partisipasi *stakeholders* dalam proses penganggaran pemerintahan dan demonstrasi akuntabilitas keuangan (GFOA, 2003). Dengan begitu, dokumen-dokumen harus siap tersedia bagi beragam *stakeholders*. Internet menyediakan kesempatan yang relatif mudah dan murah untuk menyediakan informasi keuangan bagi semua *stakeholders* (Styles & Tennyson, 2007)
3. Merupakan alat analisis yang lebih mudah untuk diaplikasikan. Informasi keuangan yang disediakan pada suatu website dalam format elektronik seperti berkas kertas kerja (*spreadsheet*) atau *eXtensible Financial Reporting Markup Language* (XFRML) memungkinkan pengguna untuk lebih mudah dan lebih luas dalam menganalisis data (Styles & Tennyson, 2007)
4. Mencegah kelebihan pengungkapan dan menghemat biaya publikasi. (Styles & Tennyson, 2007) berpendapat bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan secara elektronik dapat menjangkau lebih banyak pengguna namun tidak meningkatkan biaya cetak dan distribusi.

### **2.1.2 Penelitian Terdahulu**

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk memeriksa pelaporan keuangan internet pada organisasi-organisasi laba, namun hanya ada sedikit penelitian



dengan topik yang sama yang dilakukan di institusi pemerintahan (Laswad, dkk 2005 dan Styles dan Tennyson, 2007). Penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Desain Penelitian (Variabel & Metodologi Penelitian)	Hasil Penelitian
Fawsi Laswad, Richard Fisher, Peter Oyellere (2005)	Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities.	<p><b><u>Variabel Terikat</u></b></p> <p>Pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah</p> <p><b><u>Variabel Bebas</u></b></p> <p>Kompetisi politik, ukuran, leverage, kekayaan pemerintahan daerah, visibilitas pers, tipe <i>council</i></p> <p><b><u>Metode Penelitian</u></b></p> <p>Statistik deskriptif, analisis univariat, dan analisis regresi multivariat (regresi logistik)</p>	1. Leverage, kekayaan pemerintahan daerah, visibilitas pers memiliki hubungan positif dengan praktek IFR. Tipe council berhubungan negatif dengan praktek IRF.
Alan K. Stles dan Mack Tennyson	The accessibility of financial reporting of u.s. municipalitis on	<p><b><u>Variabel Terikat</u></b></p> <p>Model 1 : Laporan Keuangan tahunan</p>	1. Kota yang lebih besar memiliki kecenderungan melakukan pelaporan

(2007)	the internet	<p>komprehensif yang terdapat di internet</p> <p>Model 2 : Nilai indeks aksesibilitas</p> <p><b><u>Variabel Bebas</u></b></p> <p>Model 1 :</p> <p>Ukuran, struktur pemerintahan, sertifikasi pelaporan, pendapatan.</p> <p>Model 2 : ukuran, struktur pemerintahan, sertifikasi pelaporan pendapatan, kondisi keuangan kota, utang</p> <p><b><u>Metode Penelitian</u></b></p> <p>Statistik deskriptif, analisis univariat, dan analisis regresi multivariat (regresi logistik dan OLS).</p>	<p>keuangan internet. Kota dengan pendapatan per kapita dan tingkat pengungkapan akuntansi yang lebih tinggi cenderung melakukan pelaporan keuangan di internet.</p> <p>2. Aksesibilitas data keuangan di internet secara positif berhubungan dengan jumlah penduduk, pendapatan perkapita penduduk, tingkat utang, posisi keuangan kota serta kualitas pelaporan keuangan.</p>
Yurisca F. Sinaga (2011)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah	<p><b><u>Variabel Terikat</u></b></p> <p>Pelaporan Keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah</p> <p><b><u>Variabel Bebas</u></b></p> <p>Kompetisi Politik, Ukuran Pemerintahan Daerah, Leverage, Kekayaan Pemerintahan Daerah, dan Tipe Pemerintahan Daerah</p>	<p>tipe pemerintahan kabupaten secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah, Sedangkan faktor-faktor lainnya, yaitu kompetisi politik, ukuran, leverage, dan kekayaan pemerintahan daerah, tidak berpengaruh terhadap</p>

			pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.
Martani , Fitriasari dan Annisa (2014)	Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia	<b><u>Variabel Terikat</u></b> Tingkat pengungkapan keuangan dan kinerja di situs web pemerintah daerah Indonesia  <b><u>Variabel Bebas</u></b> ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat, jenis pemerintah daerah dan tingkat pengangguran.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan keuangan dan kinerja di situs web pemerintah daerah Indonesia. Sedangkan jenis pemerintah daerah dan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan keuangan dan kinerja di situs web pemerintah daerah indonesia.
Aditya Rahman, dkk. (2013)	Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia	<b><u>Variabel Terikat</u></b> Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR).  <b><u>Variabel Bebas</u></b> kompetisi politik ( <i>political competition</i> ), ukuran pemerintah daerah ( <i>size</i> ), <i>leverage</i> , kekayaan	Leverage dan Local Government Wealth terbukti berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan di internet, sedangkan Size tidak terbukti mempengaruhi pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah di internet. Political Competition terbukti berpengaruh terhadap pelaporan

		pemerintah daerah <i>(wealth)</i> , dan <i>tipe pemerintahan (type)</i>	informasi keuangan di internet sedangkan tipe pemerintahan tidak terbukti signifikan terhadap pelaporan informasi keuangan.
Zizi Sri Bulan dari Lubis (2018)	Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah Dan belanja Daerah Terhadap pelaporan Keuangan pemerintah Daerah	<b><u>Variabel Terikat</u></b> Pelaporan keuangan pemerintah daerah  <b><u>Variabel bebas</u></b> Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, kekayaan Daerah & Belanja Daerah	ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif namun signifikan dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel lainnya seperti kompleksitas pemerintah daerah dan kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah
Idris, Surasni, Irwan (2018)	<i>The Determinant Disclosure of Internet Financial Reporting Distric and City Government in Indonesia</i>	<b><u>Variabel terikat</u></b> penyajian internet financial reporting  <b><u>Variabel bebas</u></b> Kapasitas pemerintah daerah, leverage, tingkat ketergantungan daerah, opini audit bpk, jenis pemerintah daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat.	jenis pemerintah daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap penyajian internet financial reporting. Sedangkan kapasitas pemerintah daerah, leverage, tingkat ketergantungan daerah, opini audit BPK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyajian internet financial

			reporting.
Wilopo (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website	<p><b><u>Variabel terikat</u></b></p> <p>penyajian informasi laporan keuangan yang transparan melalui website pemerintah daerah</p> <p><b><u>Variabel bebas</u></b></p> <p>tingkat kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, kualitas laporan keuangan.</p>	<p>tingkat kesejahteraan masyarakat berhubungan positif dan signifikan terhadap penyajian informasi laporan keuangan yang transparan melalui website pemerintah daerah. Sedangkan faktor yang lain tidak menunjukkan dampak yang signifikan.</p>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Penyajian Laporan Keuangan di Website

Berdasarkan teori legitimasi, dijelaskan bahwa kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Masyarakat selaku pemilik mandat tertinggi dalam kaitannya dengan pemerintah merupakan pionir dalam kompetisi politik bagi pemerintah daerah, dalam hal ini pihak eksekutif. Dengan kontrak sosial antara masyarakat serta pemerintah, maka tuntutan akan keterbukaan pelaporan keuangan pemerintah sangatlah tinggi.

(Zimmerman, 1977) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kompetisi politik dengan pengungkapan dan penyajian informasi keuangan publik, dimana tingkat kompetisi politik di suatu daerah yang cukup tinggi akan membuat tuntutan penyajian informasi keuangan dari masyarakat akan semakin tinggi sehingga memacu para kepala daerah guna mengungkapkan laporan keuangannya secara terbuka melalui media publik berupa website.

*(Zimmerman, 1977) found a positive link between political competition and public financial information disclosure, arguing that political leaders, seeking to obtain more votes, try to meet voters' needs as much as possible; therefore, the more competition exists, the more incentives are for asserting that a good management is carried out. This is especially relevant in the particular case of budgetary information published by national governments because an adequate transparency in such information improves the decision-making process and also, it encourages citizens to vote (Bastida and Benito, 2007).*

Salah satu cara penyediaan informasi yang dapat dilakukan ialah melalui internet. Setelah terpilih, politisi biasanya mengabaikan janji janji pemilu yang dibuatnya dulu tanpa hukuman langsung. Namun, perilaku oportunistik ini mungkin akan berkurang jika ada oposisi yang kuat untuk memantau kelompok yang ada di pemerintah. Rival politik dalam hal ini akan meminta untuk menginformasikan opini publik apapun terkait dengan penyimpangan dalam tindakan pemerintah dari janji janji pemilu yang telah dibuat. Oleh karena itu, pihak oposisi ini berfungsi untuk menahan deviasi kepentingan antara pemilih dan politikus (Zimmerman, 1977). Akibatnya, pembuat kebijakan mungkin memiliki kepentingan dalam menjaga janji dibuat untuk pemilih jika mereka ingin dipilih

kembali. Tentu saja, dengan tingginya faktor ini maka semakin besar tingkat persaingan politik (Baber, 1983). Strategi komunikasi juga memainkan peran di sini. Jika kelompok yang mengatur ingin memenuhi komitmennya, tentunya akan tertarik menggunakan semua media pelaporan untuk mengkomunikasikan hal ini kepada warga (Baber, 1983). Website mungkin menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk pelaporan informasi (Laswad, Fisher, & Oyelere, 2005). Persaingan politik tingkat tinggi meningkatkan biaya dalam jangka panjang untuk para kepala daerah terpilih mengabaikan janji-janji sebelum pemilihan, dan memotivasi pemimpin sekarang (yang sedang memegang jabatan) setuju untuk menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih besar (Laswad, Fisher, & Oyelere, 2005). Internet adalah mekanisme yang berbiaya efektif untuk penyebaran informasi kepada para pemilih dengan cepat dan simultan sehingga dapat menjadi media penting untuk pemakaian tambahan pemantauan kewajiban politisi.

Ada bukti bahwa penggunaan internet untuk pelaporan keuangan dengan cepat akan menjadi norma di sektor swasta internasional. Securities and Exchange Commission (SEC) telah menyatakan bahwa karena investor memiliki akses lebih dan menggunakan internet, komisi akan mempertimbangkan mendorong penggunaan internet sebagai alat penyebaran utama (SEC, 2001). Dengan demikian, penggunaan sukarela dari web untuk pelaporan keuangan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia mungkin merupakan upaya untuk menunjukkan *self regulation* dalam bentuk kepatuhan terhadap praktik metode pelaporan terbaik. Menurut (Rahman, 2013) tingkat kompetisi politik yang tinggi berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan di internet, dimana pihak

pemerintah daerah petahana cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan laporan keuangannya guna meraih simpati yang tinggi dari masyarakat sekaligus memberikan poin penting terhadap kompetisi politik dalam kontestasi pilkada periode selanjutnya. Namun demikian, Menurut (Sinaga & Prabowo, 2011) menyatakan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Berdasarkan uraian teori serta penelitian di atas, kompetisi politik secara garis besar memiliki pengaruh terhadap penyajian laporan keuangan di internet, dimana dengan adanya kompetisi politik yang tinggi akan mendorong calon petahana guna menyampaikan penyajian transparansi laporan keuangannya secara lebih terbuka guna mencapai simpati dari masyarakat pemilihnya, maka dapat dirumuskan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan di internet.

### **2.2.2 Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah terhadap Penyajian Laporan Keuangan di Website**

Berdasarkan Teori Stakeholder, dijelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Pemerintah Daerah maupun kepala daerah selaku wakil eksekutif dari masyarakat memiliki peran aktif dalam membantu masyarakat yang mereka pimpin. Ukuran pemerintahan daerah yang mencakup indikator berupa total aset dari sebuah pemerintah daerah mencerminkan pula derajat kemakmuran dari suatu daerah yang mencakup masyarakat di daerah tersebut. Dengan entitas berupa pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintahan yang besar secara garis besar mereka lebih terbuka



dalam menyampaikan laporan keuangannya melalui website pemerintah. Hal ini juga mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah secara positif karena semakin besar ukuran pemerintahan daerah menandakan jumlah dan transfer kekayaan yang dikelola oleh perangkat pemerintahan daerah semakin besar pula sehingga biaya pemantauan tinggi. Menurut (Ettredge, , Richardson, & Scholz, 2002) bahwa kebutuhan untuk penyajian laporan keuangan yang besar lebih banyak digunakan oleh pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintahan yang besar pula. Ukuran pemerintah daerah ini dapat dilihat dari total aset, luas wilayah atau jumlah penduduk, namun pada umumnya penentuan ukuran pemerintah daerah tersebut dilakukan melalui total aset daerah tersebut.

Suatu pemerintahan daerah yang berukuran besar umumnya memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar. Jumlah dan besarnya transfer kekayaan yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan persaingan untuk suatu jabatan publik (Laswad, Fisher, & Oyelere, 2005).

Mengingat kebutuhan untuk pengungkapan yang lebih besar oleh pemerintahan daerah yang besar, diharapkan pemerintahan daerah tersebut akan cenderung untuk mengadopsi berbagai metode pengungkapan. Internet cenderung menjadi sarana sangat efisien dan memuaskan bagi pemerintahan daerah yang cakupan otoritasnya besar. (Debreceeny, dkk 2002; Pirchegger dan Wagenhofer, 1999 dalam Laswad, dkk 2005). Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zizi (2018) menjelaskan bahwa ukuran pemerintahan daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website, sedangkan (Martani, 2014) menjelaskan bahwa ukuran pemerintahan daerah memiliki

pengaruh positif pada tingkat pengungkapan keuangan dan kinerja di situs web pemerintah daerah Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, ukuran pemerintahan daerah memiliki pengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem website, dimana semakin tinggi total aset dari suatu pemerintahan daerah menggambarkan pula ketersediaan sumber daya daerah tersebut yang secara garis besar membuat tingkat transparansi penyajian laporan keuangan pun semakin terbuka guna menarik ketertarikan dari investor-investor yang akan menanamkan investasinya kepada pemerintah daerah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa ukuran pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan di website.

### **2.2.3 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Penyajian Laporan Keuangan di Website**

Teori Agency menjelaskan hubungan yang nyata mengenai masyarakat dan pemerintah selaku principal dan agent. Pemerintah selaku agent seringkali menjadikan kekayaan pemerintahan daerah terhadap suatu keberhasilan daerah yang dipimpinnya. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan yang besar yang diukur melalui pendapatan asli daerah tersebut memiliki kecenderungan dalam mengungkapkan laporan keuangan mereka secara terbuka sehingga pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil dalam mengelola keuangan daerah. Kekayaan pemerintah daerah juga memiliki kaitan erat terhadap tingkat pelaporan informasi keuangan oleh suatu pemerintah daerah. Christiaens (1999) menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah memiliki hubungan dengan peningkatan kualitas pengungkapan maupun penyajian laporan keuangan karena memberikan sinyal dari kualitas kepala daerah, dimana kepala daerah dapat mengambil manfaat

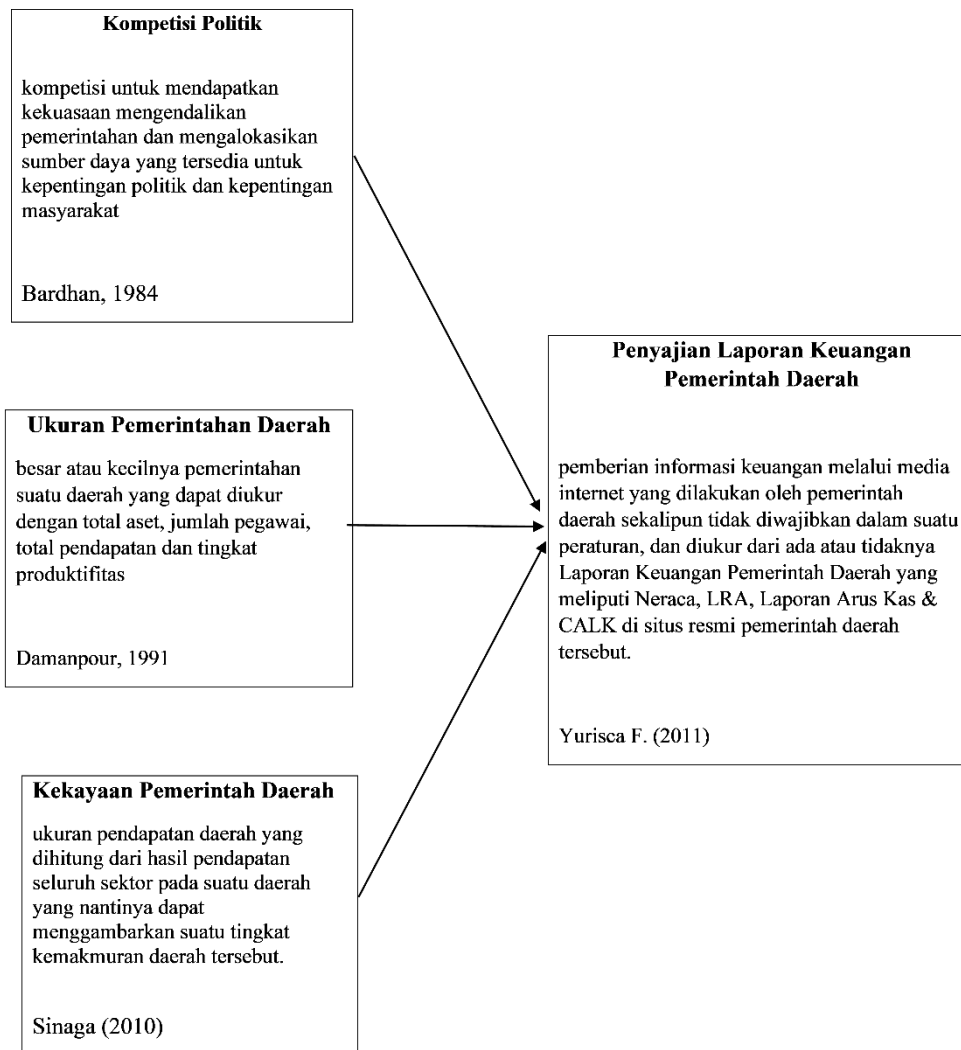
dengan meningkatkan kesempatan mereka dipilih kembali dan mengurangi biaya kepentingan.

Adanya tingkat kekayaan pemerintah daerah yang cukup tinggi, maka masyarakat pun cenderung lebih kritis dalam mengawasi tata kelola keuangan daerah tersebut. Maka dari itu, pemerintah daerah dengan tingkat kekayaan yang cukup tinggi seringkali menanggung biaya pengawasan yang cukup tinggi dalam mengaspirasi tuntutan masyarakat tersebut. Maka dari itu, pemerintah daerah kerap kali memilih media pelaporan informasi keuangan yang paling efektif. Dengan adanya media elektronik seperti internet, pemerintah daerah dapat menekan biaya serta dapat menyampaikan laporan keuangan mereka secara lengkap dan dengan biaya yang relatif lebih ringan.

Kekayaan pemda menunjukkan tingkat kemakmuran dalam suatu daerah. Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemda dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemda. Pemda dengan kekayaan yang besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dalam memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat, sehingga pemda akan berusaha memilih media pelaporan yang paling efektif. Melalui publikasi laporan keuangan di internet, pemda dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan biaya ringan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemda dan masyarakat. Laswad dkk., (2005), Cinca (2008), Handayani (2010), dan Rahman dkk., (2013) menyatakan bahwa semakin besar kekayaan pemda, maka kecenderungan pemda untuk melaporkan informasi keuangan melalui internet juga semakin tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga

& Prabowo, 2011) serta (Lubis, 2018) kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Secara garis besar kekayaan pemerintah daerah menunjukkan kemakmuran suatu daerah yang berbanding lurus dengan teknologi digitalisasi dari daerah tersebut, dimana daerah dengan tingkat kekayaan yang tinggi memungkinkan melakukan penyajian informasi data laporan keuangan yang transparan melalui website pemerintah daerah mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat maupun investor seberapa tingginya tingkat kemakmuran di daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan di internet.

Dari uraian di atas, kerangka pemikiran mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah dapat digambarkan dalam suatu model sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Penelitian**

**2.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2017)

H1: Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem website

H2: Ukuran Pemerintahan Daerah berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem website

H3 : Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem website